

## Peran kebijakan fiskal terhadap *trade-off* antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia

Fajrin Hardinandar

Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro.  
Email: fajrinhardinandar@students.undip.ac.id

### Abstrak

Hipotesis teoritis kami mencurigai adanya *trade-off* antara ketimpangan dan kemiskinan akibat dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat oleh Provinsi-provinsi di Indonesia. Kami menggunakan metode AB-GMM dengan pendekatan Koyck untuk mendeteksi hal tersebut pada 32 provinsi di Indonesia sejak tahun 2010-2018. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas fiskal dan dana transfer meningkatkan output perekonomian dan mengurangi ketimpangan di pedesaan. Sementara output perekonomian merupakan determinan pengentasan kemiskinan. Namun dana bagi hasil pajak meningkatkan ketimpangan di perkotaan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan juga perkotaan. Kemudian, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memperburuk kemiskinan di pedesaan. Sebaliknya, peran dana alokasi umum menurunkan angka kemiskinan di perkotaan. Dalam jangka panjang, 50 persen dari peningkatan output baru dapat dicapai setelah 10 periode. Sementara itu, perubahan jangka panjang pada ketimpangan jauh lebih cepat dibandingkan penurunan kemiskinan. Kami mengusulkan kebijakan silang dua arah dengan mengurangi eksplorasi sumber dana bagi hasil pajak di perkotaan dan meningkatkannya di pedesaan. Sebaliknya, jika tekanan fiskal di pedesaan lemah, maka dapat dimanfaatkan eksplorasi basis pendapatan asli daerah di perkotaan untuk mengurangi efek ketimpangan di pedesaan melalui distribusi silang.

**Kata Kunci:** Penerimaan fiskal daerah; kemiskinan; ketimpangan; model koyck

## *The role of fiscal policy towards trade-off between inequality and poverty in Indonesia*

### Abstract

*Our theoretical hypothesis suspects that there is a trade-off between inequality and poverty due to dependence on central transfer funds by Indonesian Provinces. We use the AB-GMM method with the Koyck approach to detect it in 32 provinces in Indonesia from 2010-2018. The results show that fiscal capacity and transfer funds increase economic output and reduce rural inequality. While economic output is a determinant of poverty alleviation. But tax-sharing funds increase inequality in cities and reduce poverty in rural and urban areas. Then, local own-source revenue and general allocation funds exacerbate rural poverty. Conversely, the role of general allocation funds reduces poverty in urban areas. In the long run, 50 percent of the increase in new output can be achieved after 10 periods. Meanwhile, long-term changes in inequality are much faster than poverty reduction. We propose a two-way cross-policy by reducing the exploration of sources of tax-sharing funds in cities and increasing them in rural areas. Conversely, if fiscal pressure in rural areas is weak, exploration of the original regional income base in urban areas can be exploited to reduce the effects of rural inequality through cross-distribution.*

**Keywords:** Regional fiscal revenue; poverty; inequality; koyck's model

## PENDAHULUAN

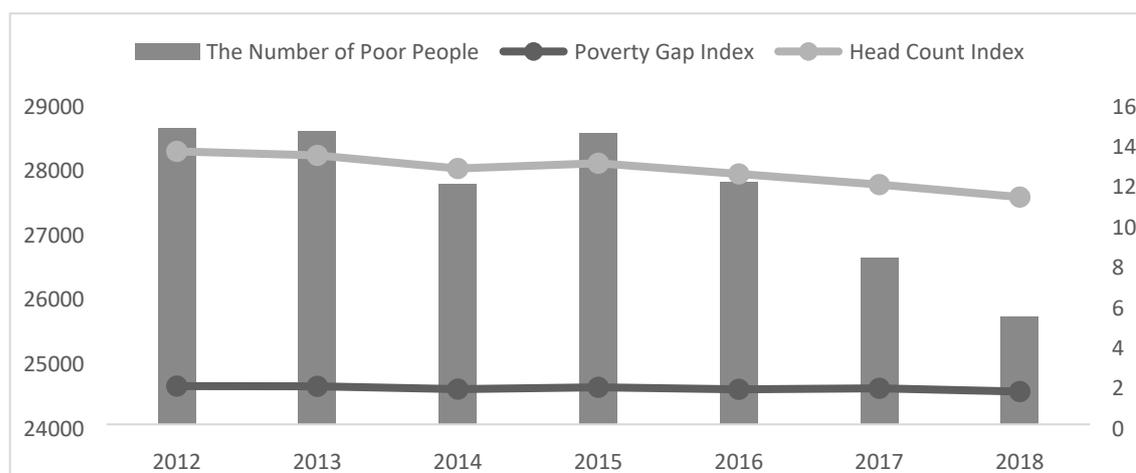
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah memiliki tujuan fundamental sebagai jembatan untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Artinya, kebijakan dalam implementasi pembangunan tidak hanya bersifat *top down*, tapi juga bersifat *bottom up*, Sumodiningrat & Ari (2016). Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengeksplorasi basis penerimaannya secara mandiri dan penerapan inklusif pada pengeluaran daerah untuk pembangunan. Namun di Negara berkembang, kebijakan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah cenderung bergantung pada pemerintah pusat. Meskipun kebebasan otonomi telah diberikan. Hal itu juga terjadi di Indonesia, lebih khususnya ketergantungan fiskal setiap provinsi pada pemerintah pusat, Enemi et al (2019).

Tabel 1. Indikator fiskal seluruh provinsi di Indonesia

Tahun	Belanja Daerah (Triliun) <sup>1</sup>	Kapasitas Fiskal (Triliun) <sup>2</sup>	Fiscal Gap (Triliun) <sup>3</sup>	Kemandirian Fiskal (%) <sup>4</sup>	DAU (Triliun) <sup>5</sup>	Share DAU <sup>6</sup> (%)
2010	1.334	841	493	4,2	192	40
2011	1.606	1.026	580	4,6	226	42
2012	2.124	1.198	926	4,04	273	44
2013	2.374	1.336	1.038	4,29	309	47
2014	2.618	1.544	1.072	4,66	342	49
2015	2.776	1.502	1.274	4,61	352	57
2016	3.582	1.638	1.944	3,74	386	3
2017	3.496	1.828	1.668	4,29	558	38
2018	3.582	1.888	1.694	4,24	564	36
Pertumbuhan per tahun (%)	26.11	14.22	11.88	4.29	3.55	44
Dimana:	<sup>2</sup> Dana bagi hasil + PAD <sup>3</sup> Belanja daerah – kapasitas fiskal <sup>4</sup> PAD/belanja daerah <sup>6</sup> DAU/total perimbangan					

Tingginya *development-cost* tidak mampu diatasi oleh basis pendapatan lokal daerah. Akibat dari peningkatan belanja daerah yang cukup tajam sementara pendapatan daerah lemah maka akan terjadi *fiscal gap* yang serius. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di mana belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia meningkat tajam sebesar 1.334 triliun tahun 2010 dan menjadi 3.582 triliun tahun 2018 atau sebesar 26,11 persen per tahun. Sementara kapasitas fiskal hanya mampu tumbuh rata-rata 14,22 persen per tahun. Akibat dari tingginya biaya pembangunan yang dibebankan kepada daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi tersebut, maka pemerintah akan bergantung pada *unconditional grants*, yaitu dana alokasi umum. Berdasarkan info grafis tersebut kita dapat membayangkan bahwa ada indikasi di mana rata-rata provinsi di Indonesia lebih banyak menggunakan dana transfer untuk belanja daerah dari pada menggunakan kapasitas fiskalnya (Bird, 2011; Nugroho, 2017). Fenomena ini biasa dikenal dengan sebutan *fly paper effect*.

Kami mencoba mengkonfirmasi secara teoritis dan dari beberapa temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa tingginya ketergantungan daerah pada *unconditional grants* (dana alokasi umum) menyebabkan tekanan fiskal pada basis pajak melemah. Hal ini merupakan indikasi relatif di mana peningkatan output akibat dana transfer akan kembali meningkatkan dana transfer. Dengan kata lain pemerintah tidak lagi perlu memaksimalkan eksplorasi pendapatan daerah melalui basis pajak, sebab output telah bertambah. Selain itu, hal tersebut merupakan model rasional pemerintah daerah yang selalu berusaha mencapai kondisi yang maksimal dengan usaha yang lebih sedikit (Raich, 2001). Lebih jauh lagi, hal ini akan memperburuk distribusi pendapatan, sebab distribusi pendapatan tidak lagi konvergen ke satu arah akibat dari tidak berkurangnya pendapatan wajib pajak. Sementara distribusi pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan (Bird, 2011; Lisna; 2013; Sanogo, 2018; Grades, 2018).



Gambar 1. Indikator kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, percepatan peningkatan pendapatan sangat nampak melalui penurunan angka kemiskinan yang cukup masif. Pada gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin menurun dengan rata-rata sebesar 27 juta jiwa. Head count index juga menunjukkan trend yang menurun dari 11.66 persen pada tahun 2012 menjadi 9.66 persen pada tahun 2018. Begitupun dengan ukuran poverty gap index dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 1.79 persen. Namun indikator kesejahteraan melalui gambaran kemiskinan absolut belum secara utuh menggambarkan fenomena yang kongkrit.

Tabel 2. Indikator makro ekonomi dari sisi kesejahteraan

Year	GRDP (Trillion)	Head Count Index	Gini ratio
2010	6.864	13.33	0.37
2011	7.286	12.49	0.38
2012	7.736	11.66	0.41
2013	8.178	11.47	0.4
2014	8.604	10.96	0.41
2015	9.034	11.13	0.4
2016	9.499	10.7	0.39
2017	9.996	10.12	0.39
2018	11.068	9.66	0.38
Average	8.696	11.28	0.40

Output dari kebijakan pembangunan pada dasarnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga meminimumkan ketimpangan yang terjadi. Masalahnya adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah cenderung melemahkan eksplorasi pajak atau dengan kata lain pendapatan daerah melalui basis lokal tidak lagi eksploratif dan potensial. Hal ini berujung pada distribusi pendapatan yang tidak merata yang dikhawatirkan memperburuk kemiskinan. Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi trade off antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tahun 2010 nilai PDRB sebesar 6.864 triliun dan meningkat menjadi 11.068 triliun pada tahun 2018, hal tersebut diikuti oleh penurunan angka kemiskinan tahun 2010-2018 dari 13.33 persen menjadi 9.66 persen, namun di sisi lain ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sebesar 0.37 menjadi 0.38 tahun 2018 dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hasil-hasil dari pembangunan hanya dirasakan oleh sebagian kecil golongan dalam masyarakat, meskipun kemiskinan menurun namun ukuran ketimpangan semakin melebar. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan redistribusi tidak berjalan efektif, Inchauste (2015).

Sementara itu mayoritas penduduk miskin hidup di pedesaan, tercatat bahwa tahun 2010-2018 head count index di pedesaan menurun dari 16.56 persen menjadi 13.1 persen. Namun head count index di perkotaan jauh lebih rendah dengan 9.87 persen di tahun 2010 menjadi 6.89 persen tahun 2018. Meskipun menunjukkan trend yang menurun, namun disparitas kemiskinan di perkotaan dan pedesaan

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di pedesaan mendapatkan distribusi yang tidak merata dari hasil pembangunan. Hal ini didukung oleh temuan Nanga (2006), yang menunjukkan bahwa semenjak kebijakan desentralisasi diimplementasikan di Indonesia, kemiskinan semakin memburuk, khususnya di wilayah pedesaan. Temuan Lisna et al (2013), juga menunjukkan hal serupa, di mana transfer fiskal cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dan memperburuk kemiskinan di Indonesia. Hasil studi yang dilakukan oleh Sanogo (2018), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal lebih besar dampaknya dalam meningkatkan pelayanan publik dari pada efeknya terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara hasil dari studi Grades (2018), dan Enami et al (2019), bahwa transfer fiskal secara progresif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di beberapa negara berkembang. Research gap ini memberikan ruang bagi kami untuk melakukan kajian lebih dalam tentang bagaimana dampak yang terjadi jika transfer fiskal terus meningkat untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan implikasi yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah di Indonesia sementara transfer fiskal cenderung menyebabkan trade off antara ketimpangan dan kemiskinan.

## METODE

### Variabel penelitian dan observasi

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah head count index yang dibagi menjadi head count index perkotaan dan pedesaan, kemudian gini ratio perkotaan dan pedesaan juga PDRB. Dalam penelitian ini gini ratio dan PDRB juga berfungsi sebagai variabel independen. Lebih jauh akan dijelaskan pada sub-bab teknik analisis. Selanjutnya variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum. Penelitian ini melibatkan 32 Provinsi di Indonesia tanpa provinsi DKI Jakarta karena bukan merupakan daerah otonom dan tidak melibatkan Kalimantan Utara karena merupakan provinsi baru sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas. Kemudian, karena data PDRB tahun 2018 belum tersedia secara utuh, maka kami terpaksa melakukan proyeksi untuk PDRB tahun 2018 dengan menggunakan perhitungan geometri dasar. Sehingga unit waktu yaitu sejak tahun 2010-2018. Studi ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara online melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Kemudian jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi dimensi time series dan cross section, Baltagi (2003).

### Panel dinamis–model koyck

Model panel dinamis menunjukkan bahwa ada unsur penyesuaian variabel dependen pada dimensi waktu sebelumnya dengan turut melibatkan unsur heterogenitas individual. Dalam studi ini kami menggunakan pendekatan koyck untuk membentuk perilaku waktu variabel independen dengan menggunakan lag dependen. Model koyck dapat dituliskan dengan sebagai:

$$Y_{it} = \beta_0(1 - \theta) + \beta_1 X_{1it} + \theta Y_{it-1} + \dots + v_{it} \quad (1)$$

Model koyck adalah model yang diawali dengan distribusi lag namun diakhiri dengan model autoregresif. Di mana  $v_{it} = u_{it} - \theta u_{it-1}$ , sehingga model Koyck adalah model autoregresif. Pada persamaan 1, parameter  $\beta_1$  merupakan efek jangka pendek perubahan  $X_{1it}$  yang direspon oleh  $Y_{it}$  dan untuk jangka panjang yang diberikan oleh  $X_{1it}$  terhadap  $Y_{it}$  yaitu dengan menghitung  $\frac{\beta_1}{1-\theta}$ . Artinya hal tersebut ekuivalen dengan semua penjumlahan seluruh koefisien  $\beta_1$  dalam model. Dengan begitu model Koyck menjadikan  $Y_{it-1}$  sebagai sebuah instrumen untuk menaksir  $X_{1it-1}, X_{1it-2}, \dots, X_{1it-n}$  tanpa perlu melibatkan banyak parameter yang menghilangkan *degree of freedom* lebih banyak. Oleh sebab pertimbangan panel dinamis maka teknik analisis untuk estimasi parameter digunakan metode Generalized Method of Moment dengan melibatkan instrumental variabel (IV) untuk menghilangkan efek endogenitas pada variabel lag dependen di sisi kanan (Verbeek, 2012). Oleh karena model yang digunakan melibatkan lag dependen maka metode estimasi yang dipilih adalah Generalized Method of Moment Arellano Bond (AB-GMM).

### Spesifikasi model struktural

Berdasarkan turunan teoritis dan kajian empiris sebelumnya juga dengan kombinasi panel dinamis struktural model koyck maka spesifikasi model short-run dalam studi ini adalah:

$$\ln PDRB = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PAD_{it} + \gamma_2 \ln DBHP_{it} + \gamma_3 \ln DAU_{it} + \theta \ln PDRB_{it-1} + v_{it} \quad (2)$$

$$\ln \text{urban\_GR} = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PAD_{it} + \gamma_2 \ln DBHP_{it} + \gamma_3 \ln DAU_{it} + \theta \ln GR_{it-1} + v_{it} \quad (3)$$

$$\ln \text{rural\_GR} = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PAD_{it} + \gamma_2 \ln DBHP_{it} + \gamma_3 \ln DAU_{it} + \theta \ln GR_{it-1} + v_{it} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \ln \text{urban\_Pov} \\ = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PAD_{it} + \gamma_2 \ln DBHP_{it} + \gamma_3 \ln DAU_{it} + \varphi_4 \ln PDRB_{it} + \varphi_5 \ln \text{urban\_GR}_{it} \\ + \rho v_{it-1} + v_{it} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \ln \text{rural\_Pov} \\ = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PAD_{it} + \gamma_2 \ln DBHP_{it} + \gamma_3 \ln DAU_{it} + \varphi_4 \ln PDRB_{it} + \varphi_5 \ln \text{rural\_GR}_{it} \\ + \rho v_{it-1} + v_{it} \end{aligned} \quad (6)$$

Dimana:

ln : logaritma natural

PDRB : produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010

GR : gini ratio

Pov : kemiskinan (*head count index*)

PAD : pendapatan asli daerah

DBHP : dana bagi hasil pajak

DAU : dana alokasu umum

$\gamma, \theta, \varphi$  : parameter variabel

$v$  : error model koyck

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian empiris trade off antara kemiskinan dan ketimpangan di indonesia

Kebijakan redistribusi pendapatan merupakan peran fundamental desentralisasi fiskal dalam upaya pengentasan kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan secara bersama-sama (Kakwani, 2004). Peran redistribusi pendapatan akan masif apabila penerimaan daerah melalui basis pajak lokal meningkat potensial. Subsidi silang dengan instrumen distribusi pendapatan tersebut akan berujung pada konvergen antara pendapatan kelompok kaya dan kelompok miskin (Enami et al, 2019). Namun dengan kebijakan transfer fiskal ada indikasi terjadi trade off pada kemiskinan dan ketimpangan, di mana transfer fiskal cenderung menyebabkan peningkatan output perekonomian namun peningkatan output tersebut justru meningkatkan ketimpangan.

Dapat kita lihat pada tabel 3 bahwa produk domestik regional bruto provinsi jawa timur paling tinggi tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.482 triliun, namun angka kemiskinan di pedesaan cukup tinggi sebesar 15.21 persen dan jauh lebih rendah di perkotaan hanya sebesar 7.13 persen. Kemudian tingkat ketimpangan di perkotaan sangat tinggi yaitu sebesar 0.44. Sementara provinsi Maluku utara dengan nilai produk domestik regional bruto terendah yaitu sebesar Rp 23 triliun, dan persentase penduduk miskin di perkotaan kecil sebesar 3.7 persen dan di pedesaan sebesar 7.58 persen, begitupula dengan indeks gini di perkotaan dan pedesaan jauh lebih kecil yaitu sebesar 0.33 dan 0.27.

Tabel 3. Indikator ekonomi provinsi di indonesia tahun 2017

Provinsi	PDRBADHK 2000(Trillion)	Urban pov	Rural pov	Urban_Gini ratio	Rural_Gini ratio
Aceh	121	10.42	18.52	0.334	0.299
Sumatera utara	487	8.96	9.05	0.365	0.264
Sumatera barat	155	5.11	7.9	0.309	0.288
Riau	471	6.55	7.86	0.343	0.299
Jambi	136	10.53	6.8	0.379	0.295
Sumatera selatan	281	12.36	13.05	0.387	0.328
Bengkulu	42	15.41	15.64	0.379	0.317
Lampung	220	9.13	14.73	0.360	0.301
Kep. Bangka belitung	50	3	7.16	0.288	0.236
Kep. Riau	166	5.39	11.26	0.355	0.286

Provinsi	PDRBADHK 2000(Trillion)	Urban pov	Rural pov	Urban_Gini ratio	Rural_Gini ratio
Jawa barat	1.342	6.76	10.07	0.399	0.326
Jawa tengah	894	10.55	12.8	0.383	0.323
Di yogyakarta	92	11	14.71	0.447	0.317
Jawa timur	1.482	7.13	15.21	0.442	0.317
Banten	409	4.69	7.67	0.380	0.270
Bali	144	3.46	5.08	0.385	0.302
Nusa tenggara barat	94	16.23	13.69	0.413	0.323
Nusa tenggara timur	62	10.11	24.65	0.365	0.309
Kalimantan barat	124	5.25	8.84	0.360	0.285
Kalimantan tengah	89	5.01	5.45	0.343	0.303
Kalimantan selatan	121	3.59	5.56	0.358	0.285
Kalimantan timur	452	4.27	9.65	0.340	0.280
Sulawesi utara	79	5.03	10.57	0.389	0.346
Sulawesi tengah	97	10.39	15.41	0.367	0.313
Sulawesi selatan	288	4.76	12.15	0.444	0.332
Sulawesi tenggara	83	7.14	14.07	0.408	0.373
Gorontalo	25	4.9	23.86	0.398	0.379
Sulawesi barat	29	9.5	11.66	0.392	0.299
Maluku	27	6.58	26.61	0.307	0.290
Maluku utara	23	3.7	7.58	0.338	0.277
Papua barat	56	5.16	34.29	0.349	0.386
Papua	148	4.55	36.65	0.302	0.407

Di provinsi gorontalo misalnya, nilai produk domestik regional bruto hanya sebesar Rp 25 triliun dan kemiskinan di perkotaan hanya sebesar 4.9 persen namun di pedesaan sebesar 23.86 persen, di mana ketimpangan pendapatan di perkotaan cukup tinggi yaitu 0.39 dan di pedesaan sebesar 0.37. Sekilas deskripsi tersebut menjeskan bahwa perbedaan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB terhadap kemiskinan dan ketimpangan di era desentralisasi menunjukkan bahwa masih banyak penduduk miskin yang tidak memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan daerah, Lisna et al, (2013); Sanogo (2018).

#### Pengujian generalized method of moment arellano bond

Pengujian menggunakan metode Generalized Method of Moment Arellano Bond (AB-GMM) menunjukkan bahwa variabel instrumental yang digunakan pada setiap persamaan struktural telah valid. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Chi2 Uji sargan yang lebih besar dari 5 persen. Begitupun dengan uji konsistensi estimator GMM dengan menggunakan uji signifikansi m1 dan m2 di mana hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien m1 signifikan pada taraf 5 persen dan 10 persen kemudian koefisien m2 tidak signifikan pada taraf 5 persen. Dalam pengujian konsistensi AB-GMM, estimator dikatakan konsisten jika  $m1 [\theta_{it} = (\theta_{it} - \theta_{it-1})]$  dan  $m2 [\theta_{it} \neq (v_{it} - v_{it-1})]$ . Hasil tersebut disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 4. Kelayakan model generalized method of moment

Dependent Variable	m1	m2	Keputusan	Sargan Test	Keputusan
Urban Poverty	0.0001 < 0.05	0.8537 > 0.05		0.202 > 0.05	IV valid
Rura Poverty	0.0004 < 0.05	0.1417 > 0.05	No	0.7243 > 0.05	IV valid
Urban Gini Ratio	0.0002 < 0.05	0.7905 > 0.05	autokorelasi	0.7037 > 0.05	IV valid
Rura Gini Ratio	0.0001 < 0.05	0.5495 > 0.05	serial	0.5495 > 0.05	IV valid
PDRB	0.0621 < 0.1	0.2880 > 0.05		0.6694 > 0.05	IV valid

Di mana digunakan :  $\alpha 5\%$  dan  $\alpha 10\%$

#### Analisis hasil esimasi

Hasil estimasi jangka pendek pada tabel 5 menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana bagi pajak dan dana alokasi umum, artinya ketika ketiga variabel penerimaan fiskal tersebut meningkat secara parsial maka akan menyebabkan PDRB

meningkat, di mana elastisitas dari pendapatan asli daerah lebih dominan meningkatkan PDRB. Selanjutnya penurunan ketimpangan di pedesaan sangat tergantung dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak. Artinya semakin meningkat dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum secara parsial akan menurunkan efek ketimpangan di pedesaan, tapi pendapatan asli daerah cenderung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di pedesaan. Hal tersebut menunjukkan adanya fenomena fly paper effect, di mana efektifitas dari eksplorasi basis pajak lokal yang diakomodasi melalui pendapatan asli daerah masih sangat lemah di pedesaan atau alokasi belanja di pedesaan yang menggunakan pendapatan asli daerah tidak efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pedesaan. Sebaliknya, alokasi belanja daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah lebih fokus pada upaya menurunkan ketimpangan di perkotaan. Hal tersebut dibuktikan oleh koefisien pendapatan asli daerah yang berpengaruh negatif. Artinya kebijakan redistribusi pendapatan melalui alokasi belanja menggunakan pendapatan asli daerah lebih produktif mengurangi ketimpangan di perkotaan dari pada di pedesaan. Hal serupa juga terjadi pada dana alokasi umum. Hasil ini mengkonfirmasi temuan dari Enami et. Al (2019).

Kami menemukan hal yang unik, di mana dana bagi hasil pajak menunjukkan hubungan yang positif terhadap ketimpangan di perkotaan. Artinya dana bagi hasil pajak yang diperoleh dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan dan bea cukai membebani masyarakat di perkotaan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin meningkat. Kemudian peningkatan PDRB dan dana bagi hasil pajak cenderung menurunkan kemiskinan di pedesaan. Subsidi silang melalui kebijakan redistribusi menggunakan instrumen dana bagi hasil pajak memang cenderung menguntungkan masyarakat miskin di pedesaan.

Tabel 5. Matriks estimasi generalized method of moment arellano bond

Variabel	Short-run				
	PDRB Koefisien	Rural Gini ratio Koefisien	Urban Gini ratio Koefisien	Rural poverty Koefisien	Urban Poverty Koefisien
Urban gini ratio	-	-	-	-	1.052***
Rural gini ratio	-	-	-	0.914	-
PDRB	-	-	-	-1.462***	-0.946***
Pendapatan Asli Daerah	0.011***	-0.002	-0.038***	0.431**	0.676***
Dana Bagi hasil pajak	0.006***	-0.024***	0.031***	-0.732***	-0.116
Dana Alokasi Umum	0.002***	-0.012***	-0.013***	0.596***	-0.008
Urban gini ratio L1	-	-	0.398***	-	-
Rural gini ratio L1	-	0.371***	-	-	-
Urban pov L1	-	-	-	-	0.886***
Rural pov L1	-	-	-	0.914***	-
PDRB L1	0.934***	-	-	-	-
Constant	0.454***	0.008	-0.098	11.728***	-1.032
Wald Chi Prob > chi2	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***

Di mana  $\alpha$  \*\*\*1%; \*\*5%

Namun sebaliknya, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum cenderung meningkatkan kemiskinan di pedesaan. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa elastisitas pendapatan asli daerah sangat lemah terhadap ketimpangan di pedesaan, sehingga eksplorasi pajak yang berlebihan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kemiskinan di area pedesaan. Artinya beban masyarakat di pedesaan akibat eksplorasi sumber pendapatan asli daerah memperburuk kemiskinan. Oleh sebab itu ada indikasi di mana alokasi dari belanja daerah di pedesaan menggunakan pendapatan asli daerah tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Hal serupa terjadi di perkotaan, di mana peningkatan pada pendapatan asli daerah justru meningkatkan kemiskinan, namun mengurangi efek ketimpangan. Artinya, alokasi belanja atau peningkatan output yang bersumber dari pendapatan asli daerah dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah sehingga menyebabkan konvergen distribusi

pendapatan tapi belum mampu mengeluarkan masyarakat menengah ke bawah dari jurang kemiskinan di perkotaan.

Sementara itu dana alokasi umum meningkatkan kemiskinan di pedesaan tapi mengurangi kemiskinan di perkotaan. Hasil ini seperti temuan dari Nanga (2006), Lisna et al (2013), Grades (2018), Sanogo (2018). Uniknya, dana alokasi umum justru menurunkan ketimpangan, di perkotaan maupun pedesaan, Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa di Indonesia dana alokasi umum tidak menyebabkan ketimpangan meningkat karena alur distribusi dana alokasi umum efektif untuk pemerataan pendapatan, tapi tidak strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, sehingga meskipun dana alokasi umum memiliki elastisitas dalam mengurangi efek ketimpangan namun kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan.

#### Analisis penyesuaian jangka panjang

Setelah kita mengetahui koefisien jangka pendek, maka pada tabel 6 kita dapat melihat pengganda jangka panjang yang merupakan total dampak dari variabel independen terhadap variabel dependennya pada setiap persamaan struktural. Peningkatan yang berkelanjutan pada pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum pada akhirnya akan menjadi peningkatan sebesar 0.16, 0.09 dan 0.03 persen. Pada informasi pertama dapat kita lihat bahwa variabel fiskal yang lebih dominan meningkatkan GRDP baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek adalah pendapatan asli daerah. Kemudian peningkatan berkelanjutan pada dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum akan mengurangi kemiskinan sebesar -0.03 dan -0.01 persen dengan peran dana bagi hasil pajak yang dominan. Juga pada variabel dependen gini rasio perkotaan, peningkatan berkelanjutan pada pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak akan mengurangi kemiskinan sebesar -0.06 dan -0.02 persen. Peningkatan berkelanjutan pada dana bagi hasil pajak akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.05 persen. Sementara peningkatan berkelanjutan pada GRDP dan dana bagi hasil pajak menurunkan kemiskinan sebesar -17, -8.51 persen dengan PDRB lebih dominan. Sementara peningkatan berkelanjutan pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum meningkatkan kemiskinan sebesar 5.01 dan 6.93 persen. Terakhir, peningkatan berkelanjutan pada gini ratio akan meningkatkan kemiskinan di perkotaan sebesar 9.22 persen. Mengacu pada model Kakwani (2004) untuk menekan angka kemiskinan maka perlu dipastikan bahwa ketimpangan tidak terjadi semakin lebar. Kemudian peningkatan berkelanjutan pada PDRB, dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan sebesar -8.29, -1.01 dan -0.07 persen dengan variabel PDRB lebih dominan dan peningkatan pendapatan asli daerah pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan di perkotaan sebesar 5.92 persen.

Tabel 6. Matriks pengganda jangka panjang

Variable	Long-run				
	PDRB Koefisien	Rural Gini ratio Koefisien	Urban Gini ratio Koefisien	Rural poverty Koefisien	Urban Poverty Koefisien
Urban gini ratio	-	-	-	-	9.228
Rural gini ratio	-	-	-	-	-
PDRB	-	-	-	-17	-8.298
Pendapatan Asli Daerah	0.166	-	-0.064	5.012	5.929
Dana Bagi hasil pajak	0.091	-0.036	0.051	-8.512	-1.017
Dana Alokasi Umum	0.031	-0.017	-0.021	6.932	-0.071

Sementara itu tabel 7 menunjukkan speed of adjustment dari total perubahan terhadap variabel dependen untuk setiap persamaan struktural. Pertama median lag, di mana 50 persen dari total perubahan dalam PDRB dapat dipenuhi selama kurang lebih 10 periode, kurang dari satu periode untuk 50 persen total perubahan ketimpangan di perkotaan dan pedesaan, kemudian kurang dari 10 periode untuk 50 persen dari total perubahan pada kemiskinan di pedesaan dan lebih cepat perubahan kemiskinan di perkotaan di mana dibutuhkan waktu kurang lebih lima periode.

Tabel 7. Kecepatan penyesuaian

Variable	PDRB Koefisien	Rural Gini ratio Koefisien	Urban Gini ratio Koefisien	Rural poverty Koefisien	Urban Poverty Koefisien
Median Lag	10.168	0.699	0.752	7.719	5.788
Mean Lag	0.824	0.589	0.661	10.627	7.771

Selanjutnya mean lag menunjukkan dampak perubahan awal, di mana dampak perubahan awal pada PDRB yang dirasakan pada periode pertama hanya sebesar 0.82 persen. Untuk perubahan awal pada ketimpangan pedesaan dan perkotaan sebesar 0.58 dan 0.61 persen. Kemudian dampak perubahan awal dari kemiskinan di pedesaan berkurang sebesar 10 persen dan di perkotaan berkurang sebesar 7 persen. Dari interpretasi tersebut kita mendapat informasi penurunan pada kemiskinan 50 persen dari total perubahan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menyesuaikan dengan total perubahan terhadap PDRB yang juga membutuhkan waktu yang lama, sementara untuk 50 persen dari total perubahan pada pengurangan ketimpangan dibutuhkan waktu kurang dari satu periode. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa sumbangan terbesar bagi pengentasan kemiskinan adalah peningkatan pada output yang diproksi melalui PDRB, sementara peningkatan PDRB dominan disumbang oleh pendapatan asli daerah. Namun catatan pentingnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah hanya berdampak pada penurunan angka ketimpangan pendapatan namun berpotensi meningkatkan kemiskinan.

## SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat bagi pengentasan kemiskinan. Penelitian ini kembali membuktikan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia sangat didominasi oleh sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDRB. Sementara itu peningkatan pada pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum sangat berperan dalam meningkatkan PDRB, di mana peran yang paling dominan diberikan oleh pendapatan asli daerah. Namun pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap perubahan ketimpangan pendapatan di pedesaan. Dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum ternyata lebih dominan memberikan dampak bagi penurunan ketimpangan di pedesaan. Hal tersebut dicurigai karena tekanan basis pajak yang diakumulasi melalui pendapatan asli daerah masih kurang efektif. Peran pendapatan asli daerah justru lebih dominan mengurangi ketimpangan di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan melalui alokasi belanja menggunakan pendapatan asli daerah lebih produktif mengurangi ketimpangan di perkotaan dari pada di pedesaan. Selain itu penurunan ketimpangan di perkotaan juga dibantu oleh peran dana alokasi umum. Tapi dana bagi hasil pajak menunjukkan hubungan yang positif terhadap ketimpangan di perkotaan. Artinya eksplorasi sumber-sumber penerimaan untuk dana bagi hasil pajak cenderung membebani masyarakat di perkotaan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin meningkat. Faktanya dana bagi hasil pajak lebih banyak dinikmati hasilnya oleh masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan di pedesaan. Kemudian peningkatan PDRB dan dana bagi hasil pajak cenderung menurunkan kemiskinan di pedesaan. Subsidi silang melalui kebijakan redistribusi menggunakan instrumen dana bagi hasil pajak memang cenderung menguntungkan masyarakat miskin di pedesaan. Namun sebaliknya, pendapatan asli daerah justru meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah sangat dominan dalam meningkatkan output, tapi akibat dari tidak efektifnya belanja pemerintah melalui sumber pendapatan asli daerah berpotensi meningkatkan kemiskinan. Sementara dana alokasi umum hanya mengurangi kemiskinan di perkotaan namun meningkatkan kemiskinan di pedesaan. Hipotesis teoritis yang kami bangun di awal menduga adanya trade off, di mana ketika kemiskinan menurun akibat dari peningkatan output akan meningkatkan ketimpangan pendapatan Tapi kami menemukan fakta unik sebaliknya, di mana pendapatan asli daerah cenderung menurunkan ketimpangan tapi kemiskinan semakin meningkat.

Sementara itu setengah dari total perubahan pada kemiskinan baru dapat tercapai setelah melewati lima periode. Hal itu menyesuaikan dengan total perubahan PDRB, di mana setengah dari total perubahan pada PDRB baru dapat dirasakan setelah 10 periode. Berbeda dengan setengah dari total perubahan ketimpangan pendapatan hanya membutuhkan kurang dari satu periode. Hal ini menunjukkan

---

---

bahwa perubahan pada ketimpangan jauh lebih elastis dibanding dengan perubahan yang dibutuhkan oleh penurunan kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan (2018). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>.
- Baltagi, Badi. H. (2003). *A Companion to Theoretical Econometrics*. Germany: BlackwellPublishing Ltd
- Bird, R. M. (2011). Subnational Taxation in Developing Countries: A Review of the Literatur. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2 (1), 139{161. Retrieved from <http://www.itdweb.org/documents/SNtaxJICEP.pdf>.
- Enami, Ali. et. al. (2019). Fiscal Policy, Inequality and Poverty In Iran: Assessing The Impact and Effectiveness of Taxes and Transfers. *Middle East Development Journal*. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/loi/rmdj20>.
- Inchauste, Gabriela et al. (2015). The Distributional Impact of Fiscal Policy in South Africa. Policy Research Working Paper 7194. Poverty Global Practice Group & Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice Group Februari 2015. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/502441468299632287/The-distributional-impact-of-fiscal-policy-in-South-Africa>
- Kakwani, N (2004). Poverty and Economic Growth with Application to Code D'Ivoire. *Review of Income and Wealth Series* 39(2). Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4991.1993.tb00443.x>
- Lisna, Vera et al. (2013). Dmapak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan; Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 14 No. 1 Julio 2013; 1-26. Retrieved from <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433>
- Nanga, Mauna. (2006). Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskina Di Indonesia; Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. (Published Ph.D. Dissertation, Institut Pertanian Bogor., 2006 Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40698>
- Nugroho, Muh. Rudi. (2017). Flypaper Effect of Regional Expenditures in Yogyakarta. *Journal of Economics and Business*. Volume 2, N0.3 September – Desember 2017. Retrieved from <http://shirkah.or.id>.
- Raich, U. (2001). *Impact of Expenditure Decentralization on Mexicon Local Government*. Mexico : Centro de Investigacion Docencia Economicas.
- Salas, Pablo Ernesto Evia. (2018). The Effect of Government Transfers on Poverty and Inequality – Three Different Perspective about Decentralization and Social Policies in Bolivia. (Published Ph.D. Dissertation, Bonn University., 2018). Retrieved from <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2018/5217/5217.htm>
- Sanogo, Tiangboho. (2018). Does Fiscal Decentralization Enchance Citizens' Access to Public Services and Reduce Poverty? Evidence From Cote d'Ivoire Municipalities in A Conflict Setting. *World Development-Elsevier* Retrieved from [www.elsevier.com/locate/worlddev](http://www.elsevier.com/locate/worlddev).
- Verbeek, Marno. (2012). *Guide to Modern Econometrics-Fourt Edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.